

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan perubahan dimana pemerintah dalam menentukan kebijakan. Suatu sistem yang dianggap mampu dalam mencegah terjadinya ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, turut serta bisa memberdayakan agar daerah mampu berkompetisi baik secara regional, maka pemerintah dapat memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya untuk tujuan memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah sendiri tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan/pendapatan daerah, tetapi juga harus ditelaah dari segi pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah seperti yang tercermin dalam APBD adalah segala pengeluaran yang dibiayai oleh sumber penerimaan asli daerah, SDO dan subsidi-subsidi dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah (Arsyad, Nurdjaman dkk, 1992:127). Uang yang keluar dari kas daerah

menurut UU No 17 tahun 2003 disebut sebagai pengeluaran daerah, sedangkan pengeluaran keuangan daerah yang sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan adanya gerakan efisiensi di seluruh sektor publik.

Pengelolaan keuangan pada pemerintahan dilakukan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaatnya.

Penyusunan laporan keuangan terkhusus yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Pada bulan Desember tahun 2017, Walikota Padang mengeluarkan Surat Edaran, Nomor : 110/SK-BPKAD/2017, tentang Pelaksanaan Transaksi Non

Tunai. Yang mana merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Kota Padang .

Implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan adalah wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non tunai merupakan langkah yang sangat efektif dalam mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014). Implementasi transaksi non tunai sudah banyak diterapkan di beberapa negara berkembang dan negara maju dalam mengurangi adanya praktik money laundry (Moshi, 2012). Perkembangan teknologi sekarang ini telah mempengaruhi sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non tunai. Perubahan sistem pembayaran berdampak sangat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian terhadap transaksi non tunai sudah banyak berkembang dan menemukan hasil bahwa dengan penerapan transaksi secara non tunai pemerintah daerah dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola. Berdasarkan penelitian empiris, transaksi non tunai mampu mencegahnya praktik-praktik kecurangan pada organisasi. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi implementasi pembayaran non tunai terdiri dari hard skill yang berupa strategi, struktur dan sistem. Dan ada pula berupa soft skill yang terdiri dari kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan dalam membangun nilai-nilai dalam organisasi atau pemerintahan.

Pengembangan pembayaran secara non tunai berbasis kartu elektronik di Kota Padang memiliki potensi sangat besar. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, kartu ATM, kartu debit dan e-money yang sangat intensif dalam beberapa tahun terakhir. Sistem pembayaran non tunai ini memberikan kemudahan proses penggunaan dana pengembangan teknologi, tuntutan masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan instrumen yang lebih efisien dan aman, dan kecenderungan. Dan pembayaran secara non tunai mempunyai keunggulan dibandingkan dengan penggunaan uang tunai, karena pembayaran secara non tunai di kota padang mendorong Bank Indonesia untuk mengupayakan lebih terciptanya masyarakat yang berkecenderungan bertransaksi secara non tunai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“PENGELOLAAN KEUANGAN BELANJA DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PADA MASA IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NON TUNAI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan belanja daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang ?
2. Bagaimana implementasi sistem pembayaran belanja daerah secara non tunai pada Dinas Perhubungan Kota Padang ?

3. Bagaimana peranan sistem aplikasi non tunai untuk optimalisasi pengelolaan keuangan belanja daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Padang ?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan belanja daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui implementasi sistem pembayaran belanja daerah secara non tunai pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
3. Untuk mengetahui peranan sistem aplikasi non tunai untuk optimalisasi pengelolaan keuangan belanja daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Untuk memberikan informasi bagi semua pihak tentang bagaimana pengelolaan keuangan belanja daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Untuk memberikan informasi tentang implementasi sistem pembayaran belanja daerah secara non tunai pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
3. Mengetahui manfaat dari sistem aplikasi non tunai pada pengelolaan keuangan belanja daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang..

4. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman selama didunia kerja, serta mengimplementasikan teori yang penulis dapat didunia kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori :bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai pengelolaan keuangan belanja daerah dan implementasi sistem pembayaran belanja daerah secara non tunai serta peranan sistem aplikasi non tunai untuk optimalisasi pengelolaan keuangan belanja daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Padang

Bab III Gambaran Umum : bab ini menguraikan tentang ruang lingkup serta Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang serta Peranan Sistem Aplikasi Non Tunai Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kota Padang.

Bab IV Analisa dan Hasil Penelitian :bab ini penulis akan menguraikan tentang pengelolaan keuangan belanja daerah dinas perhubungan kota padang pada masa implementasi pembayaran non tunai.

Bab V Penutup : bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai pada Dina Perhubungan Kota Padang.



